Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No 3 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

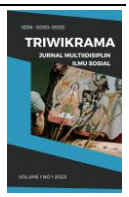

STRATEGI PENGUATAN KETAHANAN NASIONAL MELALUI BUDAYA KERJA DAN KEAMANAN SIBER: STUDI KASUS DI DISDIKPORA KABUPATEN KEDIRI

Vedanata Apta Kumara Junaidi[1], Vriandito Rezky[2], Uhal Aula Putra[3], Dharma Kukuh Wicaksono[4], Danda Ayub Christiano[5]

[1,2,3,4,5] Universitas Nusantara PGRI Kediri

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juli 2026
Revised Juli 2026
Accepted Juli 2026
Available online Juli 2026

Email:
dreamercraft787@gmail.com[1],
vrianditorezky2@gmail.com[2],
uhalaulaputra73@gmail.com[3],
dharmaw242@gmail.com[4],
christtiano32@gmail.com[5]

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author.

Abstrak

Artikel berjudul "Strategi Penguatan Ketahanan Nasional Melalui Budaya Kerja dan Keamanan Siber: Studi Kasus di Disdikpora Kabupaten Kediri" ini bertujuan untuk menganalisis ancaman terhadap ketahanan institusi di era ketidakpastian digital serta merumuskan strategi mitigasi berlandaskan nilai Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lingkungan dan wawancara langsung bersama pegawai instansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disdikpora Kabupaten Kediri menghadapi tantangan berupa kerentanan infrastruktur keamanan siber dan ancaman disinformasi (hoaks) yang masif melalui aplikasi pesan instan. Sebagai solusi penguatan institusi, dinas menerapkan strategi penegakan budaya kerja disiplin melalui Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dievaluasi rutin setiap bulan. Di samping itu, penguatan karakter bela negara dan semangat gotong royong diwujudkan secara nyata melalui program "Selasa Asri" dan "Jumat Asri". Pembahasan dalam artikel ini membandingkan temuan lapangan dengan berbagai penelitian terdahulu yang relevan untuk menguji konsistensi dan kekhasan kasus Disdikpora Kabupaten Kediri. Kesimpulannya, ketahanan nasional di tingkat daerah dapat dijaga melalui sinergi antara kedisiplinan birokrasi, kewaspadaan digital, dan aktualisasi nilai Pancasila di lingkungan kerja.

Kata Kunci: Ketahanan Nasional, Keamanan Siber, Budaya Kerja, Bela Negara, Disdikpora Kediri.

PENDAHULUAN

Ketahanan nasional pada era digital tidak lagi hanya tertumpu pada aspek ketenteraan dan fisikal, sebaliknya sangat bergantung pada kemampuan institusi negara dalam menghadapi gangguan teknologi, kejahatan siber, serta mengekalkan kestabilan birokrasi. Transformasi digital telah membawa ancaman yang nyata berupa penyebaran disinformasi atau berita palsu (hoaks), penipuan siber (phising), dan manipulasi sosial yang sering menyasar instansi pelayanan publik melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kediri memegang peranan yang sangat penting dalam sektor pendidikan daerah. Walau bagaimanapun, instansi ini menghadapi kelemahan pada infrastruktur jaringan yang memerlukan pembaruan keamanan siber secara rutin, serta sering berhadapan dengan serangan hoaks seperti penyebaran undangan fiktif dan manipulasi nomor telepon pegawai. Apabila ancaman siber dan masalah budaya kerja ini tidak ditangani dengan segera, kelancaran pelayanan publik pasti akan terganggu. Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan penegakan disiplin kerja sangat diperlukan sebagai wujud nyata tindakan bela negara dan ketahanan institusi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, kajian ini merumuskan dua permasalahan utama yang perlu dianalisis secara mendalam. Pertama, kajian ini ingin mengidentifikasi bentuk ancaman siber dan disinformasi digital yang sedang dihadapi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kediri pada masa kini. Kedua, kajian ini memfokuskan pada persoalan tentang sejauh mana keefektifan strategi terpadu melalui

penegakan budaya kerja formal, yaitu melalui Peraturan Bupati berkaitan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta pelaksanaan program sosial budaya seperti “Selasa Asri” dan “Jumat Asri” dalam upaya memperkuat ketahanan institusi tersebut.

Selaras dengan rumusan masalah yang dikemukakan, kajian ini memiliki dua tujuan utama yang ingin dicapai. Tujuan pertama adalah untuk mengidentifikasi serta menganalisis secara terperinci berbagai bentuk kelemahan infrastruktur siber dan ancaman disinformasi yang menyasar operasi harian di Disdikpora Kabupaten Kediri. Sementara itu, tujuan kedua adalah untuk menganalisis keefektifan pelaksanaan peraturan disiplin birokrasi berserta aktualisasi nilai gotong royong dalam memperkuat ketahanan nasional pada tingkat instansi pemerintahan daerah.

Kajian ini dibangun berlandaskan beberapa kerangka teori utama yang berkaitan dengan ketahanan nasional dan digitalisasi. Menurut teori Hanita (2023), ketahanan wilayah pada era modern sangat bergantung pada tingkat kestabilan birokrasi serta kecakapan dalam pengelolaan infrastruktur digital. Hal ini turut didukung oleh pandangan Prasetiyo dan Kusumawati (2020) yang menyatakan bahwa transformasi Revolusi Industri 4.0 membawa kemudahan, namun pada saat yang sama menuntut kesiapsiagaan aparatur negara dalam menghadapi berbagai ancaman siber. Selain itu, Nugroho dan Nasrullah (2020) menyoroti isu mengenai kelemahan penggunaan media sosial dan aplikasi pesan instan yang mudah disalahgunakan untuk menyebarkan disinformasi sehingga mampu merusak kestabilan sosial. Sebagai langkah penyelesaian, konsep literasi digital sebagai suatu bentuk bela negara telah ditegaskan oleh Saputra (2022), Santoso dkk. (2023), dan Alinata dkk. (2024). Mereka berpendapat bahwa praktik etika berinternet (netiket) dan kecakapan literasi digital bagi setiap penjawat awam merupakan benteng pertahanan masa kini yang paling relevan untuk menangkis berbagai bentuk radikalisme informasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendapatkan gambaran empiris dari lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kediri. Populasi dan subjek penelitian adalah pegawai yang bertugas di instansi tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu observasi langsung terhadap lingkungan dan budaya kerja kantor, serta wawancara mendalam kepada pegawai untuk menggali tantangan sistem informasi dan integritas birokrasi. Data hasil observasi dan wawancara disajikan pada bagian Hasil, kemudian dianalisis dan dibandingkan secara kualitatif naratif dengan temuan penelitian terdahulu yang relevan pada bagian Pembahasan untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL

Ancaman Siber dan Disinformasi Digital

Berdasarkan hasil wawancara, tantangan teknologi terbesar yang dihadapi oleh Disdikpora Kabupaten Kediri saat ini adalah kebutuhan peningkatan kualitas jaringan internet dan pembaruan sistem keamanan siber secara terus-menerus. Pihak dinas harus secara rutin mendatangkan teknisi operator untuk mencegah terjadinya galat (error) sistem. Walaupun hingga saat ini tidak pernah terjadi kebocoran data penting, instansi sangat sering menghadapi

serangan hoaks. Serangan disinformasi tersebut terjadi melalui grup aplikasi pesan instan WhatsApp, seperti peredaran tautan undangan fiktif bermuatan penipuan dan manipulasi pemakaian nomor seluler yang memaksa pegawai menutup akses komunikasi untuk sementara waktu.

Budaya Kerja dan Integritas Birokrasi

Disdikpora Kabupaten Kediri menerapkan standar operasional birokrasi yang berpijak pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Penerapan aturan formal ini dibarengi dengan rekapitulasi penilaian presensi yang dievaluasi secara ketat setiap bulannya. Sistem pengawasan internal instansi dilakukan melalui rapat dan evaluasi rutin bulanan, di mana Kepala Dinas memimpin langsung pertemuan tersebut guna menyampaikan informasi kinerja dan menetapkan target bagi pegawai.

Penguatan Nilai Pancasila Melalui Program "Asri"

Dalam aspek penguatan karakter pegawai, dinas tidak hanya berfokus pada aturan tertulis, melainkan juga melalui kegiatan sosial. Terdapat program rutin "Selasa Asri" dan "Jumat Asri", yakni kegiatan kerja bakti dan gotong royong membersihkan lingkungan kantor secara bersama-sama. Rasa kebersamaan yang terjalin saat bekerja bakti berfungsi merekatkan solidaritas di lingkungan internal dinas.

Kebutuhan Literasi Digital dan Netiket Pegawai

Merespons tingginya paparan hoaks melalui WhatsApp, hasil wawancara menunjukkan bahwa pegawai aparatur negara memerlukan peningkatan kecakapan literasi digital dan etika berinternet (netiket) agar lebih kritis dalam merespons tautan asing atau nomor yang tidak dikenal. Kebutuhan ini menjadi salah satu temuan penting yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.

PEMBAHASAN

Ancaman Siber dan Disinformasi Digital: Tinjauan Komparatif

Kerentanan infrastruktur jaringan internet yang dihadapi Disdikpora Kabupaten Kediri sejalan dengan pola umum yang ditemukan pada berbagai instansi pemerintah di Indonesia. Alfi, Yundari, dan Tsaqif (2023) menemukan bahwa transformasi digital pelayanan publik di Indonesia secara umum masih dibayangi risiko keamanan siber yang signifikan, sehingga kebijakan yang kuat dan kesadaran organisasi menjadi prasyarat keberlanjutan transformasi tersebut, sebuah simpulan yang relevan dengan kondisi Disdikpora yang harus rutin mendatangkan teknisi untuk mencegah galat sistem. Kajian Ramadhani, Enriko, dan Sari (2025) terhadap insiden kebocoran Pusat Data Nasional turut menggarisbawahi bahwa lemahnya manajemen keamanan siber pada level teknis dapat berdampak luas lintas instansi; meskipun Disdikpora belum pernah mengalami kebocoran data, pola kerentanan infrastruktur yang serupa mengindikasikan potensi risiko yang sama apabila pembaruan sistem tidak dilakukan secara konsisten.

Pada aspek disinformasi, temuan tingginya paparan hoaks melalui grup WhatsApp di lingkungan Disdikpora memperkuat hasil penelitian Nugroho dan Nasrullah (2020) yang menyatakan bahwa media sosial dan aplikasi pesan instan sangat rentan disalahgunakan untuk penyebaran hoaks yang mengganggu stabilitas sosial. Pola ini juga konsisten dengan kajian Sarjito (2024) yang menunjukkan bahwa penyebaran hoaks melalui platform seperti WhatsApp dan Facebook tidak hanya menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi, tetapi juga

berpotensi melemahkan ketahanan nasional pada level mikro institusional. Berbeda dengan studi Sarjito (2024) yang lebih berfokus pada dampak hoaks terhadap polarisasi politik nasional, temuan di Disdikpora menunjukkan bentuk ancaman yang lebih operasional, yaitu penyalahgunaan identitas pegawai melalui manipulasi nomor telepon dan tautan undangan fiktif, sehingga ancaman yang dihadapi bersifat lebih personal dan langsung memengaruhi kelancaran layanan administratif harian.

Budaya Kerja dan Disiplin Birokrasi: Perbandingan dengan Studi Lain

Penegakan disiplin pegawai Disdikpora melalui Perbup SKP yang dievaluasi rutin setiap bulan sejalan dengan temuan Fikri, Mubarok, Nabasa, Romadan, dan Kholik (2026) yang menegaskan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai instansi pemerintah, terutama pada aspek ketaatan terhadap aturan dan ketepatan waktu. Kombinasi antara aturan formal dan budaya organisasi yang sehat, sebagaimana diterapkan Disdikpora melalui rapat evaluasi bulanan yang dipimpin langsung Kepala Dinas, turut mengonfirmasi simpulan Fikri dkk. (2026) bahwa kinerja optimal pegawai pemerintah memerlukan sinergi antara disiplin dan budaya kerja, bukan sekadar regulasi tertulis semata.

Namun demikian, studi kasus Irmawan (2023) terhadap penegakan disiplin ASN di Kabupaten Wakatobi memperlihatkan gambaran yang sedikit kontras: meskipun regulasi disiplin telah diterbitkan, implementasinya di lapangan sering kali masih lemah akibat rendahnya sosialisasi serta minimnya pemahaman atasan langsung dalam pengawasan berjenjang. Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan Disdikpora Kabupaten Kediri dalam menjaga kedisiplinan pegawai, yang ditandai dengan rekapitulasi presensi ketat dan keterlibatan langsung pimpinan dalam evaluasi bulanan, merupakan praktik baik yang belum tentu terjadi secara merata di instansi pemerintah daerah lain, sekaligus menegaskan pentingnya kepemimpinan aktif sebagai faktor penentu keberhasilan penegakan disiplin birokrasi.

Penguatan Nilai Gotong Royong dan Bela Negara: Sintesis dengan Penelitian Sebelumnya

Program “Selasa Asri” dan “Jumat Asri” sebagai wujud kerja bakti rutin selaras dengan kajian Tyas, Ayu, dan Yunanda (2022) yang menegaskan bahwa nilai gotong royong merupakan perwujudan konkret sila ketiga Pancasila yang dapat diimplementasikan di berbagai lingkungan kerja, termasuk pada institusi yang berorientasi formal sekalipun. Pranadji (2019) turut menambahkan bahwa penguatan kelembagaan gotong royong perlu terus diupayakan secara sengaja karena praktik tersebut cenderung melemah seiring modernisasi organisasi; temuan ini relevan untuk menjelaskan mengapa Disdikpora perlu menjadikan kegiatan “Asri” sebagai program rutin dan terjadwal, bukan sekadar inisiatif insidental, agar nilai kebersamaan tidak luntur di tengah tuntutan kerja birokrasi yang semakin formal dan berbasis target kinerja individual seperti SKP.

Dibandingkan dengan kajian-kajian gotong royong yang umumnya membahas konteks masyarakat desa atau industri berskala besar, praktik di Disdikpora menunjukkan adaptasi nilai gotong royong pada skala mikro-organisasi pemerintah daerah, yang berfungsi ganda yaitu merawat lingkungan fisik kantor sekaligus merekatkan solidaritas pegawai lintas bidang.

Strategi Literasi Digital sebagai Solusi: Perbandingan Lintas Penelitian

Kebutuhan akan literasi digital dan netiket bagi pegawai Disdikpora sejalan dengan pandangan Saputra (2022), Santoso, Supiati, Komalasari, Hafidah, dan Subandi (2023), serta Alinata, Susanti, Sari, Dinillah, Nurfadilah, dan Sofi (2024) yang menegaskan bahwa kecakapan literasi digital dan etika berinternet merupakan fondasi penting kewarganegaraan digital di era Revolusi Industri 4.0. Secara lebih spesifik untuk konteks ASN, kajian Ahyati dan Sya’rawi (2022) tentang penerapan netiket di lingkungan kerja menunjukkan bahwa etika berkomunikasi daring

yang baik turut menjaga citra institusi dan membangun kepercayaan publik, sebuah aspek yang sangat relevan dengan kasus Disdikpora, mengingat manipulasi nomor telepon pegawai melalui WhatsApp secara langsung berisiko merusak reputasi dinas di mata masyarakat.

Perbandingan keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa strategi penguatan ketahanan institusi Disdikpora Kabupaten Kediri, yang memadukan penegakan disiplin formal, pelestarian budaya gotong royong, dan kebutuhan literasi digital, secara umum konsisten dengan kerangka teoretis ketahanan nasional di era digital yang diajukan Hanita (2023) maupun tuntutan kesiapsiagaan aparatur menghadapi Revolusi Industri 4.0 sebagaimana dikemukakan Prasetiyo dan Kusumawati (2020). Perbedaan utama terletak pada skala dan konteks: jika kajian-kajian terdahulu banyak membahas ketahanan nasional pada level kebijakan makro atau ketahanan wilayah secara umum, penelitian ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai tersebut diterjemahkan secara konkret pada level operasional satu instansi daerah, sehingga memberikan gambaran empiris tentang bagaimana ketahanan nasional sesungguhnya dibangun dari unit-unit birokrasi terkecil sekalipun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulannya, nilai ketahanan nasional di Disdikpora Kabupaten Kediri sungguh diuji oleh ancaman transformasi digital berupa penyebaran hoaks lewat aplikasi komunikasi serta keharusan menjaga infrastruktur keamanan siber, sebagaimana juga ditemukan pada berbagai instansi pemerintah lain di Indonesia. Kendati demikian, dinas berhasil mempertahankan stabilitas ketahanannya melalui penegakan budaya kerja yang diatur lewat Perbup SKP, pengawasan terpusat yang aktif dari pimpinan, dan pelestarian gotong royong melalui program Asri, sebuah kombinasi strategi yang sejalan dengan, namun juga memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan, praktik pada instansi pemerintah daerah lain yang dikaji dalam berbagai penelitian terdahulu. Sebagai saran perbaikan ke depan, Disdikpora direkomendasikan untuk menyelenggarakan sosialisasi literasi digital secara khusus agar pegawai kebal terhadap phising (penipuan tautan), serta menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) mitigasi krisis apabila sewaktu-waktu akun atau nomor komunikasi instansi diretas pihak luar.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyati, I. U., & Sya'rawi, H. 2022. Etika Berinternet (Netiket) dalam Komunikasi Daring di Politeknik Negeri Banjarmasin. Jurnal INTEKNA, 22 (1): 25–30.

Alfi, M., Yundari, N. P., & Tsaqif, A. 2023. Analisis Risiko Keamanan Siber dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik di Indonesia. Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, 6 (2).

Alinata, R., Susanti, E., Sari, W. A., Dinillah, S., Nurfadilah, & Sofi, D. N. 2024. Membangun Kecakapan Kewarganegaraan Digital Melalui Implementasi PKn di Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik, 2 (1): 20–29.

Fikri, L. F., Mubarok, Y., Nabasa, T. I., Romadan, O. R., & Kholik, R. N. 2026. Pengaruh Disiplin Kerja dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai pada Instansi Pemerintah. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 16 (7): 2691–2700.

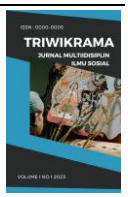

Hanita, M. 2023. Transformasi Ketahanan Wilayah pada Era Digital: Peran Kepemimpinan Digital. Jurnal Ketahanan Nasional, 29 (2): 178–198.

Irmawan, A. 2023. Upaya Pemerintah Daerah dalam Penegakkan Disiplin ASN: Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Wakatobi. Jurnal Administrasi Publik, 19 (1): 50–84.

Nugroho, A. C., & Nasrullah, R. 2020. Pemanfaatan Media Sosial dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Era Digital. Jurnal Moral Kemasyarakatan, 5 (2): 64–78.

Pranadji, T. 2019. Penguatan Kelembagaan Gotong Royong dalam Perspektif Sosio Budaya Bangsa. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, 27 (1).

Prasetiyo, W. H., & Kusumawati, C. D. 2020. Pendidikan Kewarganegaraan Digital: Peluang dan Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0. Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 8 (1): 54–67.

Ramadhani, E. H., Enriko, I. K. A., & Sari, E. L. I. P. 2025. Kajian Strategik Manajemen Keamanan Siber terhadap Proyek Telematika di Indonesia: Studi Kasus Kebocoran Pusat Data Nasional. Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi, 6 (1): 570–580.

Santoso, G., Supiati, A., Komalasari, L., Hafidah, I., & Subandi, E. T. 2023. Kewarganegaraan Digital Di Era Industri 4.0: Tantangan Dan Peluang Membangun Masyarakat Global Yang Inklusif. Jupetra: Jurnal Pendidikan Transformatif, 2 (2): 141–146.

Saputra, M. 2022. Integrasi Kewarganegaraan Digital Dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Menumbuhkan Etika Berinternet (Netiket) Di Kalangan Mahasiswa. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 12 (1): 6–15.

Sarjito, A. 2024. Hoaks, Disinformasi, dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia. Journal of Governance and Local Politics (JGLP), 6 (2): 175–186.

Tyas, S. A., Ayu, V. K., & Yunanda, W. W. 2022. Implementasi Nilai Gotong Royong Dalam Upaya Meningkatkan Rasa Nasionalisme Di Industri Pertahanan. Jurnal Kewarganegaraan, 6 (1): 1244–1250.